

Judul : Mayoritas Parlemen Dunia Dukung Parlemen Indonesia tentang Resolusi Rohingya
Tanggal : Selasa, 31 Oktober 2017
Surat Kabar : Republika
Halaman : 2

Mayoritas Parlemen Dunia Dukung Parlemen Indonesia Tentang Resolusi Rohingya

Kepiawaian lobi dan diplomasi parlemen Indonesia semakin menunjukkan kelasnya di dunia internasional. Hal ini setidaknya bisa dilihat di sidang ke-137 Inter Parliamentary Union (IPU) yang digelar di Saint Petersburg, Rusia, Ahad (15/10). Pada forum tersebut parlemen Indonesia berhasil meyakinkan parlemen dunia.

Hasilnya, ide dan gagasan parlemen Indonesia diterima parlemen dari berbagai negara. Gagasan parlemen Indonesia yang diterima mayoritas parlemen dunia adalah mengenai resolusi Rohingya.

Delegasi parlemen Indonesia yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR-RI Fadli Zon dan sepuluh anggota DPR lainnya, yakni Nurhayati Ali Assegaf (Partai Demokrat), Evita Nursanty (PDI-P), Siti Hediati Soeharto (Golkar), Rofi Munawar (PKS), Vanda Sarundajang (PDI-P), Dwi Aroem Hadiatie (Golkar), Jon Erizal (PAN), Jazuli Juwaini (PKS), dan Amelia Anggraini (Nasdem) sukses dalam menjalankan misi kemanusiaan di level internasional.

Fadli mengaku merasa senang dan gembira lantaran proposal *emergency items* terkait krisis Rohingya yang diusulkan oleh delegasi parlemen Indonesia, berhasil diadopsi menjadi resolusi sidang IPU ke-137.

Berpidato di hadapan para parlemen dunia, politisi dari Fraksi Gerindra ini mengungkapkan bahwa Indonesia sangat konsen dalam melihat krisis kemanusiaan di Rakhine. Bagi Indonesia, lanjut dia, masalah Rohingya sangat krusial dan fundamental lantaran menyangkut nilai-nilai universal yang harus dibela.

Oleh sebab itu, parlemen Indonesia memiliki sikap yang konsisten terhadap krisis Rohingya. Isu ini membutuhkan dan harus mendapatkan perhatian resmi dari forum parlemen, baik itu forum parlemen regional AIPA, APA, dan juga saat ini, yakni IPU. "Untuk itu kita mengajukan isu Rohingya sebagai *emergency items* untuk dimasukkan ke dalam resolusi IPU," ungkap Fadli.

Menurut Fadli, diterimanya isu Rohingya sebagai resolusi IPU ke-137 di Rusia, sekaligus menjadi catatan penting bagi forum parlemen regional, seperti AIPA, yang tidak memberikan sikap apa pun terhadap krisis Rohingya. Padahal permasalahan tersebut terjadi di halaman wilayah sendiri.

Dimasukkannya krisis Rohingya dalam resolusi IPU ini menjadi koreksi bagi sikap parlemen ASEAN dan negara-negara ASEAN yang justru pasif dan menutup mata terhadap krisis di



FOTO BERSAMA Delegasi parlemen Indonesia yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR-RI Fadli Zon dan sepuluh anggota DPR lainnya.

Rohingya. "Diterimanya isu Rohingya ke dalam resolusi IPU, menjadi bukti bahwa IPU sebagai forum parlemen dunia benar-benar hadir, tidak menutup mata dan telinga, saat krisis kemanusiaan tengah berlangsung di salah satu kawasan di dunia," ujarnya.

Menurut Fadli, penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine akan lebih cepat tercapai jika ada dorongan IPU sebagai representasi anggota parlemen dunia. Itu sebabnya melalui IPU, Indonesia bersama Bangladesh, Turki, Irak, Iran, Sudan, Maroko, dan Uni Emirat Arab, mendorong agar isu Rohingya masuk menjadi salah satu resolusi di IPU. "Dan upaya tersebut kini berhasil," akunya.

Keberhasilan lobi

Untuk diketahui, berhasilnya dorongan mengenai krisis Rohingya tidak lepas dari upaya lobi yang dilakukan Wakil Ketua DPR Fadli Zon terhadap sejumlah Negara, termasuk terhadap tuan rumah, Wakil Ketua Senat Federasi Rusia Mr. Umakhanov.

Pada saat lobi, Fadli meyakinkan Rusia untuk saling dukung terhadap sejumlah proposal resolusi ke-137 IPU *Assembly*. Fadli meyakinkan Rusia untuk turut memberikan dukungan proposal *emergency items* yang diusulkan Indonesia. Delegasi Rusia bersepakat untuk menjadikan krisis Rohingya sebagai agenda pembahasan dalam IPU ke-137.

Tak hanya masalah Rohingya saja, Fadli dalam pertemuan dengan perwakilan parlemen Rusia juga menyinggung isu Papua Barat, yang belakangan ini

aktif dikampanyekan oleh beberapa negara terkait hak asasi manusia.

Fadli menegaskan kepada delegasi Rusia bahwa Papua merupakan bagian integral Indonesia, dan meluruskan sejumlah tuduhan yang direkayasa atas adanya isu pelanggaran HAM.

Kuatnya lobi yang dilakukan parlemen Indonesia, direspon baik oleh Wakil Ketua Parlemen Rusia Mr. Umakhanov. Ia mengaku salut dengan upaya Indonesia, untuk itu ia memastikan negaranya mendukung Indonesia sepenuhnya.

Bahkan, Umakhanov menganggap delegasi parlemen Indonesia memberikan kontribusi yang konstruktif dalam pertemuan IPU. Hal ini ditandai dengan diterimanya hampir seluruh masukan delegasi parlemen Indonesia terhadap proposal resolusi yang diajukan Rusia dalam Komite Demokrasi dan HAM.

Umakhanov mengatakan, kemajuan demokrasi di Indonesia yang berdasarkan Pancasila menjadi pembelajaran penting bagi wacana demokrasi di dunia. Bahwa, praktik demokrasi tidak dapat disamakan di setiap negara. Demokrasi memiliki akar sejarah, tradisi, dan latar belakang yang berbeda di tiap-tiap negara.

Sebagai data, hubungan Indonesia-Rusia sudah lama terjalin di berbagai bidang mulai ekonomi, politik, budaya dan pariwisata. Neraca perdagangan Indonesia - Rusia masih surplus untuk Indonesia dan bisa terus dikembangkan, khususnya terkait bidang pertahanan.